
EDUKASI EKONOMI PAJAK: MENGURAI MISPERSEPSI SEBAGAI PARADOKS MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

Enhancing Tax Economic Education: Addressing Misperception as a Societal Paradox toward Motor Vehicle Tax Compliance in Makassar City

Mira^{1*}, Khairil Asnan Haedar², Andi Nirma Baya Batara³

Universitas Muhammadiyah Makassar¹, Universitas Sibatokkong Mambo Bone², Universitas Muhammadiyah Makassar³, Indonesia

*Corresponding Author: bioinc075@gmail.com

Abstract

Taxation is a financial obligation that must be fulfilled by individuals and business entities as a form of contribution to the funding of public services and the maintenance of national economic stability. One of the significant types of local taxes is the Motor Vehicle Tax (Pajak Kendaraan Bermotor or PKB). However, many members of the public continue to hold misconceptions, creating a paradox in public attitudes toward motor vehicle taxation in Makassar City. These misconceptions result in a disconnect between tax awareness and the actual fulfillment of tax obligations. This study aims to: (1) examine how misconceptions regarding motor vehicle taxation influence decision-making in tax compliance among residents of Makassar City, South Sulawesi; and (2) analyze how misunderstandings of PKB regulations impact taxpayers' attitudes and behaviors in determining their compliance decisions. This research adopts a qualitative survey method, utilizing interview and observation sheets as data collection instruments. Interviews with representatives from the SAMSAT office in Gowa Regency revealed that while the general public does not appear to suffer from widespread misconceptions about PKB, there is a notable potential for misunderstanding among individuals aged 21–27 and among women with limited experience in tax payments. Meanwhile, interviews with students from Muhammadiyah University of Makassar indicate that misconceptions span various aspects, including misinformation and demographic factors such as age, gender, and occupation.

Keywords: *Vehicle Tax, Vehicle Tax Misperception, Taxpayers.*

Abstrak

Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara sebagai bentuk kontribusi dalam pembiayaan pelayanan publik dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Salah satu jenis pajak yang signifikan di tingkat daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meski demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami mispersepsi sebagai paradoks masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar, di mana persepsi yang keliru menyebabkan ketidaksesuaian antara kesadaran membayar pajak dan kenyataan pemenuhan kewajiban. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengkaji bagaimana mispersepsi terhadap pajak kendaraan bermotor memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kepatuhan pajak kendaraan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan; dan 2) Menganalisis bagaimana kesalahan persepsi terhadap regulasi PKB berdampak pada sikap dan perilaku wajib pajak dalam menentukan keputusan kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Penelitian ini merupakan

EDUKASI EKONOMI PAJAK: MENGURAI MISPERSEPSI SEBAGAI PARADOKS MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

penelitian kualitatif survey dengan menggunakan instrumen penelitian lembar wawancara dan lembar observasi. Hasil wawancara dengan pihak SAMSAT Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa meskipun masyarakat secara umum tidak mengalami mispersepsi terkait PKB, potensi mispersepsi masih terdapat pada kelompok usia 21–27 tahun dan perempuan dengan pengalaman terbatas dalam pembayaran pajak. Sementara itu, hasil wawancara dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar mengindikasikan bahwa mispersepsi mencakup seluruh aspek, mulai dari misinformation hingga faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Mispersepsi PKB, Wajib Pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban finansial yang dikenakan kepada individu maupun badan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan pelayanan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (fungsi *budgetair*), pajak juga memiliki fungsi pengaturan (fungsi *regulerend*), pemerataan (fungsi distribusi), dan partisipatif (fungsi demokrasi) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Rajendra et al., 2023; Yuldasheva & Artikov, 2021). Di Indonesia, sistem perpajakan diterapkan secara berjenjang, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, sejalan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Violeta et al., 2020). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Makassar, yang mengalami peningkatan kepemilikan kendaraan setiap tahunnya (BPS Makassar, 2023; Violeta, 2020).

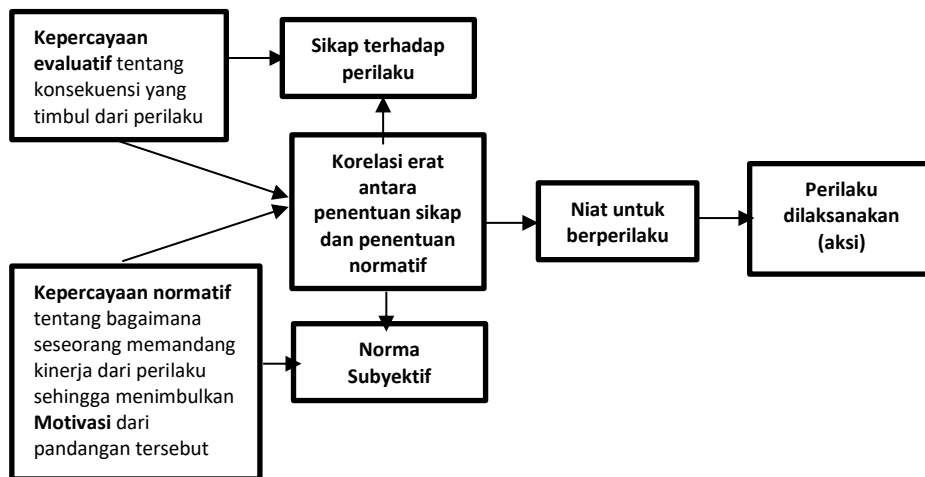
Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan tidak selalu diiringi dengan kepatuhan wajib pajak terhadap PKB. Data menunjukkan bahwa tingkat realisasi penerimaan PKB di Kota Makassar justru mengalami penurunan: dari 82,55% pada tahun 2018, menjadi 81,40% pada 2019, dan menurun drastis menjadi 60,85% pada tahun 2020 (Hasan, 2022). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan, seperti pemberian insentif pajak selama masa pandemi COVID-19 (Limantoro, 2022), pelaksanaan program pemutihan pajak (Erin et al., 2022; Meidiaz & Subagyo, 2023), serta digitalisasi pembayaran melalui QRIS (Septari & Wahyunadi, 2024). Meskipun demikian, pelanggaran terhadap kewajiban membayar PKB tetap terjadi, yang mengindikasikan adanya persoalan mendasar terkait persepsi wajib pajak.

Fenomena mispersepsi atau kesalahpahaman terhadap pajak muncul sebagai faktor utama yang memengaruhi rendahnya kepatuhan. Fenomena mispersepsi memiliki korelasi erat dengan fenomena paradoks karena kedua fenomena tersebut beririsan pada aspek *cognitive biases*. Bias kognitif (*cognitive biases*) menginisiasikan individu agar cenderung menyukai informasi yang sesuai

EDUKASI EKONOMI PAJAK: MENGURAI MISPERSEPSI SEBAGAI PARADOKS MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

keyakinan mereka, sementara kompleksitas informasi teknis, seperti perpajakan, sering memicu salah penafsiran dalam sistem perpajakan suatu negara (Jeong & Choi, 2019; Setiyani & Septiani, 2024). Brumley (2014) mengelompokkan mispersepsi ke dalam dua penyebab utama, yaitu ketidaktahuan dan kesengajaan. Ketidaktahuan mencakup *misunderstanding* (kesalahpahaman terhadap esensi PKB), *misinformation* (minimnya informasi dan transparansi), serta *miseducation* (kurangnya edukasi perpajakan) (Erasashanti et al., 2024; Karlinah et al., 2024). Sementara itu, kesengajaan berkaitan dengan rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kontribusi mereka.

Hasil survei awal terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) menunjukkan bahwa 40% dari mereka memiliki persepsi negatif terhadap PKB. Ketidakpuasan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi, pelayanan administrasi yang tidak memadai, serta ketidaktransparanan dalam perubahan tarif pajak. Hal ini mencerminkan bagaimana pengalaman subjektif dan pengetahuan terbatas dapat membentuk persepsi negatif dan berujung pada ketidakpatuhan (Setiyani, 2024; McCaffery, 2003). Penelitian ini menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa niat berperilaku ditentukan oleh tiga aspek, yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Berikut skema dari *Theory of Planned Behavior* yang dicantumkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Skema Modifikasi Perilaku didasarkan pada *Theory of Planned Behaviour* (Sumber: Kollmuss & Agyeman, 2002)

Dalam konteks perpajakan, sikap yang positif terhadap manfaat pajak, dukungan sosial dari lingkungan, serta persepsi bahwa membayar pajak itu mudah akan meningkatkan kecenderungan seseorang untuk patuh (Bosnjak et al., 2020; Markonah & Manrejo, 2022). Selain TPB, kajian ini juga mengadopsi Model Respons Perilaku Wajib Pajak yang menekankan pentingnya *feedback loop*

EDUKASI EKONOMI PAJAK: MENGURAI MISPERSEPSI SEBAGAI PARADOKS MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

atau umpan balik dari otoritas pajak terhadap wajib pajak. Umpan balik yang positif dan tepat waktu akan membentuk pemahaman yang akurat dan memperbaiki kesalahan persepsi. Sebaliknya, ketidakhadiran komunikasi yang jelas akan memperkuat mispersepsi dan menurunkan tingkat kepatuhan (Blaufus et al., 2020; Angeles, 2021). Kompleksitas sistem pajak progresif di Indonesia juga menjadi penyebab utama kesalahpahaman. Banyak wajib pajak yang keliru memahami bahwa tarif pajak tertinggi dikenakan pada seluruh penghasilan, bukan hanya pada bagian yang melebihi batas tertentu (Alfiyan, 2021; Mohammed & Tangi, 2024). Ditambah lagi dengan rendahnya literasi perpajakan serta komunikasi publik yang lemah, hal ini memperparah ketimpangan persepsi dan rasa ketidakadilan dalam sistem perpajakan (Palil, 2005; Sari, 2022).

Dalam konteks PKB, salah satu bentuk mispersepsi yang sering terjadi berkaitan dengan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di mana sebagian wajib pajak menilai bahwa biaya yang dikeluarkan tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Persepsi semacam ini sering dipengaruhi oleh pengalaman birokrasi yang tidak efisien, kurangnya pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya informasi yang memadai (Muhtarudin, 2023; Kurniawan, 2019). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mispersepsi terhadap PKB memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh wajib pajak, khususnya di kalangan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi respons perilaku wajib pajak yang terbentuk akibat persepsi yang keliru, serta merumuskan model yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alaminya. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi persepsi dan interpretasi individu terkait pajak kendaraan bermotor (PKB). Menurut Walidin, Saifullah, dan Tabrani (2015), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, dengan menekankan pada pengalaman, perspektif, dan interaksi subjek dalam lingkungan yang natural.

EDUKASI EKONOMI PAJAK: MENGURAI MISPERSEPSI SEBAGAI PARADOKS MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada dua lokasi utama. Lokasi pertama adalah Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan informan utama berupa mahasiswa yang memiliki kendaraan bermotor roda empat dan telah membayar pajak selama minimal dua tahun. Lokasi kedua adalah Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa sebagai sumber data sekunder mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2024 hingga Januari 2025.

3. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kuesioner terbuka. Wawancara dilakukan terhadap mahasiswa dan pihak SAMSAT, menggunakan instrumen terstruktur yang terdiri atas pertanyaan tentang faktor penyebab mispersepsi dan model respons perilaku berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan resmi, termasuk data statistik dari SAMSAT dan publikasi lainnya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

4. Teknik dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilah dan menyederhanakan informasi penting. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk mempermudah interpretasi. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan tema yang muncul selama proses analisis. Dalam menjamin validitas temuan, penelitian ini menerapkan dua teknik uji keabsahan, yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan melakukan observasi secara saksama dan berulang, sementara triangulasi dilakukan melalui perbandingan data dari berbagai sumber dan metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2008; Denzin, 2012; Creswell & Poth, 2018). Langkah ini bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya.

EDUKASI EKONOMI PAJAK: MENGURAI MISPERSEPSI SEBAGAI PARADOKS MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Persepsi PKB Kota Makassar oleh Pihak SAMSAT Kab. Gowa

Pihak SAMSAT Kabupaten Gowa memahami Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari pemilik kendaraan bermotor kepada daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Mereka menyadari bahwa PKB dari kendaraan yang beroperasi di Kota Makassar seharusnya masuk ke pendapatan Kota Makassar. Namun, banyak kendaraan berplat luar daerah (termasuk dari Gowa) masih digunakan di Makassar, menyebabkan potensi kehilangan pendapatan bagi pemerintah daerah setempat. Dari hasil wawancara, pihak SAMSAT Kabupaten Gowa menyatakan bahwa sering terjadi kebingungan dalam membedakan kendaraan yang benar-benar berdomisili di Gowa dengan yang hanya terdaftar di Gowa namun beroperasi di Makassar. Hal ini diperparah dengan tidak adanya sistem pendataan yang mampu mendeteksi secara akurat lokasi operasional kendaraan. Mereka juga menyebutkan bahwa perpindahan kepemilikan atau lokasi kendaraan tidak selalu diikuti oleh perubahan data pada registrasi, sehingga sulit memastikan keakuratan data PKB.

Secara umum, persepsi pihak SAMSAT Kabupaten Gowa terhadap PKB di Makassar cenderung mengakui adanya ketimpangan antara lokasi operasional dan lokasi pembayaran pajak kendaraan. Mereka melihat perlunya koordinasi yang lebih intensif antar daerah, khususnya antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, untuk menghindari kebocoran pajak. Salah satu solusi yang mereka sarankan adalah peningkatan sosialisasi serta penguatan basis data digital yang terintegrasi antar SAMSAT di berbagai kabupaten/kota.

2. Persepsi Wajib Pajak terhadap PKB sebagai respon Sikap dan Perilaku Pengambilan Keputusan Wajib Pajak

Wajib pajak memandang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai kewajiban rutin yang harus dipenuhi, namun persepsi ini tidak selalu diiringi dengan pemahaman mendalam mengenai tujuan dan manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Beberapa wajib pajak menyatakan bahwa mereka membayar pajak semata-mata karena takut terkena denda atau sanksi administratif, bukan karena kesadaran akan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Sikap ini mencerminkan bahwa keputusan membayar PKB lebih bersifat pragmatis daripada reflektif. Dalam wawancara, sejumlah wajib pajak mengungkapkan bahwa pelayanan di kantor SAMSAT sudah cukup baik, namun masih ada yang merasa prosesnya kurang efisien dan memakan waktu lama. Hal ini turut memengaruhi perilaku

EDUKASI EKONOMI PAJAK: MENGURAI MISPERSEPSI SEBAGAI PARADOKS MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

pengambilan keputusan dalam hal kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak yang mengalami pengalaman kurang menyenangkan cenderung menunda atau bahkan menghindari kewajiban mereka. Faktor kenyamanan dan efisiensi pelayanan terbukti menjadi variabel penting dalam membentuk persepsi positif.

Selain faktor pelayanan, pengetahuan dan informasi mengenai PKB juga menjadi penentu utama perilaku wajib pajak. Sebagian dari mereka merasa kurang mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai prosedur, tarif, dan penggunaan dana pajak. Ketidakjelasan ini menyebabkan munculnya keraguan dan sikap apatis terhadap kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, akses informasi yang transparan dan mudah diakses sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat.

Namun demikian, ada pula wajib pajak yang menunjukkan sikap positif, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi atau memiliki pemahaman ekonomi yang baik. Kelompok ini cenderung melihat pembayaran PKB sebagai kontribusi penting dalam mendukung pembangunan daerah, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum. Sikap ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran yang lebih baik terhadap manfaat pajak dapat memengaruhi perilaku yang lebih patuh. Secara keseluruhan, persepsi wajib pajak terhadap PKB sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara pengalaman pribadi, kualitas layanan, dan tingkat pemahaman tentang pajak itu sendiri. Keputusan untuk membayar atau tidak membayar pajak bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi juga karena pengaruh sosial dan psikologis yang kompleks. Untuk itu, pendekatan edukatif dan peningkatan pelayanan publik menjadi strategi yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

Pembahasan

Pihak SAMSAT Kabupaten Gowa telah menunjukkan peran aktif dalam menyebarluaskan informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui media sosial, poster, dan sosialisasi langsung, yang terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak dan meminimalkan kesalahan persepsi (Sunaningsih, 2024; Azizah, 2024; Remitasari, 2023; Zamzami, 2023). Namun demikian, masih ditemukan adanya mispersepsi di kalangan masyarakat, khususnya berdasarkan aspek demografi. Wajib pajak usia 21–27 tahun umumnya membayar pajak atas dorongan pihak lain, bukan kesadaran pribadi, sementara mayoritas yang datang langsung ke SAMSAT adalah laki-laki berusia 30 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan perbedaan akses informasi dan tanggung jawab sosial

EDUKASI EKONOMI PAJAK: MENGURAI MISPERSEPSI SEBAGAI PARADOKS MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

antara laki-laki dan perempuan, serta pentingnya penyesuaian strategi komunikasi pajak berdasarkan usia dan gender (Adikur, 2022; Natasha, 2020; Twesige, 2023).

Dari sisi pemahaman tarif pajak, SAMSAT mengasumsikan masyarakat memahami rincian pembayaran karena informasi tertera dalam STNK dan tersedia secara daring. Namun, asumsi ini belum tentu berlaku bagi semua kalangan, terutama yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi (Yana, 2024). Selain itu, faktor profesi dan kondisi ekonomi juga memengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak dengan penghasilan tetap cenderung lebih patuh dibandingkan mereka dengan pendapatan tidak menentu, mengingat keterbatasan keuangan dapat menjadi penghalang utama dalam memenuhi kewajiban pajak (Puspanita, 2022; Prasantiya, 2018; Sari & Susanti, 2014). Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan menjadi faktor penting lainnya; wajib pajak yang percaya pada pengelolaan dana PKB cenderung lebih patuh, sementara skeptisisme dapat meningkatkan potensi mispersepsi dan ketidakpatuhan (Wahyuni, 2022; Meidiaz, 2023).

Dalam kerangka *Theory of Planned Behaviour*, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan evaluatif (keyakinan atas manfaat pajak), kepercayaan normatif (dorongan sosial), dan motivasi. Misalnya, kesadaran pajak meningkat dengan adanya program pemutihan pajak (Yana, 2024), dan dorongan dari orang tua pada wajib pajak muda menunjukkan pengaruh normatif dalam keputusan membayar pajak. Sementara itu, keterlibatan rendah perempuan mencerminkan pengaruh sosial berdasarkan gender. Wajib pajak yang memahami manfaat pajak serta merasa bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil dan transparan akan lebih termotivasi untuk membayar pajak secara mandiri (Ajzen, 2011). Dengan demikian, pendekatan strategis berbasis demografi, peningkatan literasi pajak, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi kunci dalam membentuk kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat tidak mengalami mispersepsi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), namun potensi mispersepsi masih ditemukan pada kelompok usia 21–27 tahun yang cenderung membayar pajak karena dorongan orang tua, serta pada perempuan yang memiliki pengalaman terbatas dalam proses pembayaran PKB. Penelitian terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai representasi wajib pajak menunjukkan bahwa mispersepsi terjadi secara menyeluruh dalam aspek *misinformation*, *misunderstanding*, *miseducation*, bias kognitif, *framing*, serta faktor demografi seperti usia, jenis

EDUKASI EKONOMI PAJAK: MENGURAI MISPERSEPSI SEBAGAI PARADOKS MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

kelamin, dan pekerjaan. Temuan dari wawancara, observasi, dan kuesioner ini mengindikasikan bahwa mispersepsi tersebut dapat memengaruhi sikap, perilaku, dan keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PKB.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Makassar dan pihak SAMSAT Kabupaten Gowa atas dukungan, data, serta kesempatan kolaborasi dalam proses pengumpulan informasi yang menjadi landasan utama penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para responden mahasiswa yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara dan pengisian kuesioner.

Conflict of Interest

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun profesional, yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107>
- Blaufus, K., Huber, H.-P., & Maiterth, R. (2020). Tax Misperception and Its Effects on Decision Making-Literature Review and Behavioral Taxpayer Response Model. *Accounting for Transparency*, 13, 1–86. <https://ssrn.com/abstract=3697982>
- Erasashanti, A. P., Cahaya, Y. F., Yuniarti, R., Rifaldi, M., & Prasetyo, J. H. (2024). The Role of Taxpayer Awareness in Enhancing Vehicle Tax Compliance in Indonesia: An Attribution Theory Approach. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 162–180. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.163>
- Erin, E., Faiz, Z. B. A., & Riantori, F. A. (2022). The Effect of Motor Vehicle Tax Bleaching Program on Taxpayer's Behavior through the Mediation of Tax Paying Intention in Lampung Province. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 172–179.

EDUKASI EKONOMI PAJAK: MENGURAI MISPERSEPSI SEBAGAI PARADOKS MASYARAKAT TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

- Jeong, S., & Choi, I. H. (2019). Cognitive Bias in Decision Making According to Change of Tax Policy: An Exploratory Study. *Journal of System and Management Sciences*.
<https://doi.org/10.33168/JSMS.2019.0409>
- Karlinah, Lady, Diphayana, W., & Wiguna, N. K. C. (2024). Upgrade your knowledge in tax: Tax awareness from an early age in education. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 9(2), 433–444. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v9i2.12664>
- Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research*, 8(3), 239–260. <https://doi.org/10.1080/13504620220145401>
- Markonah, M., & Manrejo, S. (2022). Tax Compliance Model Based on Planned Behavior of Taxpayers Mediating Intention to Pay Taxes. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 14(1), 60–66. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i1.649>
- Meidiaz, E. V., & Subagyo. (2023). DETERMINATION OF TAXPAYER (WP) COMPLIANCE WITH MOTOR VEHICLE TAX (PKB) IN SAMSAT MEDAN AND INFLUENCE FACTORS. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(2), 219–240.
<https://doi.org/10.20473/baki.v8i2.44782>
- Palil, M. R. (2005). Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence on Demographic Factors in Malaysia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 11–21. <http://puslit.petra.ac.id/~puslit/journals/>
- Rajendra, M. D., Rachman, A. P., Yuliana, A. W., & Murti, G. T. (2023). Understand the meaning and provisions for the administration of bookkeeping and tax records based on general provisions and tax procedures in Indonesia . *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 6(1).
- Septari, I., & Wahyunadi, I. (2024). Effectiveness of QRIS on Motor Vehicle Tax Payment Compliance through the Technology Acceptance Model (TAM) in West Nusa Tenggara. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, 7(1).
<https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-12>
- Setiyani, R., & Septiani, T. (2024). How to address heuristics and cognitive biases in tax decision-making: A systematic literature review. *Journal of Socioeconomics and Development*, 7(2), 181–192. <https://doi.org/10.31328/jсед.v7i2.5726>
- Vialeta, P., Susetyo, D., & Yulianita, A. (2020). The Effect of Progressive Tax, Number of Vehicles and Tax Arrears on Revenue Transfer of Motor Vehicle Title Fee in South Sumatra Province. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 9(2), 27.
<https://doi.org/10.26458/jedep.v9i2.656>
- Yuldasheva, I. R., & Artikov, N. A. (2021). Types and Functions of Taxes in a Market Economy. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 579.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2925>